

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Faisal Abdullahi. 2012. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta;

Rangrang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

Jakarta; PT Rajagrafindo.

Eka Deviani dan Rifka Yudhi. 2022. *Hukum Kepegawaian: Historisitas dan Aktualitas Aparatur Sipil Negara (PNS & PPPK)*. Bandar Lampung; Pustaka Media.

Binsar Gultom. 2010. *Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia*. Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan ketiga. Yogyakarta: Mira Buana Media.

Nurfaika Ishak. 2021. *Sengketa Kepegawaian*. Jakarta; Eureka Media Aksara.

Eny Kusdarini. 2019. *Asas-asas umum Pemerintahan yang baik dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; UNY Press.

Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13. Jakarta; Kencana.



Muhaimin. 2020. *Metode penelitian Hukum*. Mataram; Universitas Mataram.

Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta; Sinar Grafika.

B. Ragawino. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung; Universitas Padjajaran.

W. Riyawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Sinar Grafika.

Setiajeng, dkk. 2010. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.

Sigit Pramukti, Angger dan Meylani Cahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta; Pustaka Yustisia.

P.J.L.M Sinlaeloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta; Setara Press.

Srihartini dan Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum kepegawaian (edisi kedua)*. Jakarta; Sinar Grafika.

Tua Simarmata. et al. 2023. *Metode penelitia Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta; Selat Media Patners.

Tedi Sudrajat. 2017. *Hukum Birokrasi Kepegawaian:Kewenangan Dan Jabatan*. Jakarta; Sinar Grafika.



Syamsir dan Nika Saputra. *Administrasi kepegawaian*. Jakarta; Eureka Media aksara.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Farahdiba Maudi. 2020. *Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Ditahan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Temporary Dismissal of Civil Servants Detained Due to Corruption Crimes*. Tesis. Universitas Hasanuddin.

Almarif Mahmud. 2010. *Kajian Yuridis Mengenai Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Yang Diduga Terlibat Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Umi Nafisah. 2014. *Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(studi kasus Di Pemerintahan Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2010-2012)*. Disertasi. Universitas Islam Sunan Kalijaga.

Welly Octaria. 2019. *Implementasi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Riau Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*. Skripsi. Universitas Islam Riau.



Elbarino Shah. 2014. *Prosedur Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jika Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tesis*. Universitas Medan Area.

Jurnal atau karya Ilmiah lainnya

Akhmaddhian, S., & Febrian, K. R. 2019. Sanksi Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Bolos Kerja. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol, 10 Nomor 1.

Wicipto Setiadi. 2009. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Vol. 6 Nomor 4.

M. Arbina. 2019. Dualisme Pengaturan Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, *DE LAGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4 Nomor 1.

N. Fadillah. 2016. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 Nomor 1.

Ahmad Gelora Mahardika. 2022. Rekonstruksi Politik Hukum Pengaturan ASN Dalam Sistem Merit Hukum Kepegawaian Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol 1. Nomor 11.

ay Hendrik Mezak. 2014. Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*. Vol. 5, Nomor 1.



- Lalu Ikhsan. 2020. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Dari Aspek Hukum Kepegawaian Dan Sistem Peradilan Administrasi. *Jurnal IUS*. Vol 2. Nomor 1.
- A. Komara. 2019. Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia. *Mimbar Pendidikan*. Vol.4 Nomor 1.
- Margareta Kalakik, et al. 2022. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Sudah Divonis Terpidana Narkotika Kurang dari 2 Tahun. *Novum: Jurnal Hukum*. Vol.1, Nomor 2.
- OC Nugroho. 2018. Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18 Nomor 4.
- I Nugroho. 2013. Mengembangkan Etika Kepemimpinan: Fenomena pada Jabatan Publik. *Malang Corruption Watch (MCW)*. Universitas Widyagama Malang. Vol.2 Nomor 1.
- Bayu Prasetyo. Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. *Jurnal PALAR*. Vol 7 Nomor 2.
- N.A Sinaga. 2020. Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 10 Nomor 2.



T. Sudrajat. 2017. Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. *Civil Service Journal*. Vol.11 Nomor 2.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Badan Kepegawaian Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Artikel Internet

Dpn Sbmi. 2023. Belajar Mengidentifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang.SBMI. Edisi Tanggal 16 September



2023. <https://sbmi.or.id/belajar-mengidentifikasi-tindak-pidana-perdagangan-orang/>

Dilmiltama. 2022. Kode Etik Aparatur Sipil Negara. Edisi 22 Juni 2022 <https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/layanan-hukum/kode-etik-aparatur-sipil-negara.html>

Iksan Bayu Saputra. 2023. Peran Oknum Pegawai Imigrasi Makassar di Kasus TPPO 94 Warga Sulsel. *Detik Sulsel*. Edisi 16 Juni 2023 <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6777065/peran-oknum-pegawai-imigrasi-makassar-di-kasus-tpo-94-warga-sulsel/amp> diakses pada tanggal 14 November 2023 pukul 14.00 Wita

Republika. 2023. Kemenkumham Bali Telusuri Pegawai Imigrasi Terlibat Perdagangan Ginjal. Edisi Tanggal 22 Juli 2023. <https://news.republika.co.id/berita/ry6otb349/kemenkumham-bali-telusuri-pegawai-imigrasi-terlibat-perdagangan-ginjal>, diakses pada tanggal 14 November 2023 pukul 15.03 wita

Nusa Bali. 2023. Oknum Imigrasi Terlibat TPPO Jual Ginjal. Edisi 23 Juli 2023 <https://www.nusabali.com/berita/146687/oknum-imigrasi-terlibat-tpo-jual-ginjal>

Kabar Jawa Timur. 2023. Oknum PNS Imigrasi Kediri Ditetapkan Tersangka Oleh Polda Jatim. Edisi 30 Agustus 2023



<https://kabarjawatimur.com/oknum-pns-imigrasi-kediri-ditetapkan-tersangka-oleh-polda-jatim/>

Hery Supandi. 2023. Ibu Berprofesi ASN Tega Jual Anak Kandung kepada Pria Hidung Belang *Detik Sulsel*.
<https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6788236/ibu-berprofesi-asn-tega-jual-anak-kandung-ke-pria-hidung-belang/amp>

Beni Jo.2023. 6 Fakta Sindikat Penjualan Ginjal Kamboja, Ada Anggota Polri. *Tirto.id*. Edisi Tanggal 24 Juli 2023
<https://amp.tirto.id/6-fakta-sindikata-penjualan-ginjal-kamboja-ada-anggota-polri-gNhf>

Kominfo. 2023. Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Edisi 28-12-2022
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita>

